**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MALUNDA (SMPN4 MALUNDA)
KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE**

Irfan¹, M. Syariat Tajuddin², Muh. Abid Alimuddin Lidda³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al
Asyariah Mandar, Indonesia
Email: abid0401@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to obtain a description of the implementation of the free education program at SMPN 4 Ulumanda District, Majene Regency. The research methodology used in this study is a qualitative descriptive method. This is intended to obtain data and a real picture of the implementation of the free education program at SMP Negeri 4 Malunda, Ulumanda District, Majene Regency. In this study, it was found that the implementation of the Free Education Program at SMP Negeri 4 Malunda, Ulumanda District, Majene Regency had educational costs for students related to the learning process. The Free Education Program does not completely eliminate all educational costs including payments for taking batik clothes and sports clothes because they are included in School Operational Costs. Apart from that, there are no more payments related to the learning process, but instead provide costs for students in the form of poor scholarships.

Keywords: *Implementation, Gratis Onderwysprogram*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi dari implementasi program pendidikan gratis di SMPN 4 Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan gambaran nyata atas implementasi program pendidikan gratis di SMP Negeri 4 Malunda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene telah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan diantaranya adalah pembayaran untuk pengambilan baju batik dan baju olahraga karena itu masuk dalam Biaya Operasional Sekolah.

Diluar daripada itu tidak ada lagi pembayaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran, melainkan memberikan biaya bagi siswa dalam bentuk beasiswa miskin.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pendidikan Gratis

PENDAHULUAN

Dalam amanah Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa salah satu dari tujuan kehidupan berbangsa adalah untuk mengembangkan sekaligus memajukan Negara di kancah Internasional sebagai Negara yang juga memiliki daya saing di dunia pendidikan dan sains. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi sebuah syarat utama adanya perubahan yang nyata pada kehidupan bermasyarakat. Fakta kehidupan dalam perhitungan ilmiah menjelaskan bahwa setiap persoalan hanya akan menemukan jalan keluar ketika ilmu pengetahuan dan atau teknologi dijadikan sebagai sebuah solutif untuk keluar dari permasalahan. Di era persaingan global yang begitu masif hari ini, setiap Negara akan menemui kemajuan dan ketertinggalannya ketika di perhadapkan pada rendah dan meningkatnya sebuah pengetahuan. Itulah sebabnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pendidikan adalah salah satu hal yang umum bagi kehidupan masyarakat, hingga pendidikan bisa dijadikan tolak ukur dalam mengetahui kualitas manusia itu sendiri (Busyairi & Hamjah, 2020).

Namun sejauh ini sebab karena mungkin akibat dari percepatan pengetahuan di negara-negara yang sering kita sebut sebagai negara adi daya maka sering kali kita anggap bahwa pemerintah selalu menemui kegagalannya dalam mendorong perkembangan pendidikan baik di dunia sains maupun teknologi. Maka dari itu bisa kita ketahui bahwa kebijaka ketika tidak segera dilaksanakan, maka tidak bisa diketahui tingkat keberhasilan bagi orang banyak (Mujianto Solichin, 2015).

Jika hal tersebut kita terjemahkan, maka dapat kita beri suatu kesimpulan bahwa perran pendidikan sangatlah penting untuk generasi pelanjut bangsa Indonesia khususnya, hal ini dimaksudkan demi kelangsungan Negara bangsa Indonesia. Menjadikan siswa menjadi manusia yang berkualitas pengetahuan, kreatifitas tinggi dan kelakuan dalam bersikap yang baik semata mata bermaksud untuk member ruh pada Negara agar memiliki citra yang bermartabat. Hal ini telah diupayakan dengan sebuah program pendidikan gratis, yaitu “wajib belajar pendidikan dasar Sembilan (9) Tahun. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Urusan efektifitas dan efesiensi pendidikan akan

diselesaikan melalui sistem pendidikan nasional dan penerapannya ditambah dengan upaya upaya lain untuk menjawab masalah pemerataan pendidikan semisal kebijakan beasiswa. Dengan demikian, selain bisa mengembangkan tingkat hidupnya, mereka juga bisa berlomba untuk Negara-negara lain secara umum, dan bukan suatu yang belum tentu mereka akan menjadi actor pereyasa masa depan (Hasbullah, M, 2015).

Namun kecenderungan yang terjadi pengaruh lingkungan lebih dominan mengarah pada pengaruh negative. Sehingga pemerintah melalui sekolah memiliki tantangan yang besar dalam menyediakan menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas dan tenaga pengajar yang kompotensi di bidang masing-masing demi membantu mewujudkan program pemerintah yaitu mendorong perkembangan pendidikan. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dan Warga Negara secara eksflisit terlihat melalui pasal 31 UUD 45 (Yanti, 2020).

Secara umum implementasi program pendidikan gratis di tingkat SMPN sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan "bahwa masyarakat yang berumur 6 sampai 15 tahun berhak ikut dalam pendidikan dasar. Amanah ini bersamaan dengan kewajiban pemerintah untuk memberi seluruh jaminan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan kepada peserta didik. Dengan berkembangnya suatu pendidikan tentu menciptakan Sumber Daya Manbusia (SDM) yang baik. Sebagaimana yang dimaksud bahwa SDM merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud SDM melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik (Mukhlis Hannan 2017:114)

Amanah UUD NRI 1945 melahirkan tanggung jawab sesuai pasal 31 serta UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi; Pemerintah Daerah menanggung terlaksananya berhak belajar sekurang-kurangnya di tingkat Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, adapun ayat 3 disebutkan agar wajib belajar adalah kewajiban negara yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan pemerintah dan masyarakat. Juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perihal pemerintahan daerah, pasal 13 telah memberikan kekuasaan sebagian kegiatan wajib kedaerah baik kabupaten maupun provinsi, beberapa urusan yang menyangkut pendidikan. Kebijakan kekuasaan kegiatan ini sudah memberikan ruang wewenang bagi pemerintah, karena pemerintah daerah ikut berpartisipasi pada berkembangnya pendidikan di daerahnya. Hal ini pemerintah Majene menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. melalui dari amanat tersebut, maka pemerintah harus memberi pelayanan pendidikan kepada semua siswa-siswi untuk tingkat pendidikan dasar juga semua pendidikan yang sederajat (Jumadi, 2014).

Disebutkan bahwa, pendidikan gratis menjadi salah satu alasan dalam proses penyelenggaraan pemerataan pendidikan, namun bukan menjadi rujukan inti yang bisa menjadi jaminan akan meningkatnya pengetahuan intelektualitas manusia atau peserta didik. Namun penerapan sistem yang mengatur di dalamnya juga harus diperhatikan sehingga implementasi pemajuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengandalkan seluruh kemampuan dari insan pendidikan.

Permasalahan timbul dalam kaitannya dengan implementasi program pendidikan gratis tingkat SMPN Kecamatan Ulumanda di Kabupaten Majene diantaranya terlihat dari penyaluran dana pendidikan yang digelontorkan untuk sekolah acapkali mengalami keterlambatan. Akibatnya, konsentrasi para pendidik harus terpecah untuk mencari solusi atas keperluan sekolah. Ditambah lagi dengan ketersediaan pasilitis berupa sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan untuk peningkatan kecerdasan intelektual juga tampaknya masih belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Bentuk dari penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam sebuah buku penelitian mengungkapkan bahwa berusaha menyajikan data yaitu penelitian deskriptif, menganalisis dan menginterpretasi untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. Dalam pandangan lain mengungkapkan definisi yaitu cara kualitatif sebagai syarat penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif seperti kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Adapun instrument atau tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam bentuk penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada lokasi penelitian. Intrumen penelitian adalah komponen kunci dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan beberapa hal untuk digunakan dalam sebuah instrument dalam melakukan peneletian. Hal tersebut dimaksudkan demi menyelesaikan segala macam bentuk permasalahan dengan maksimal, sehingga data data yang dikumpulkan valid dan reliable. Dalam hal penemuan data yang valid dan reliable maka diperlukan semacam instrumrn dalam mengumpulkan data akan digunakan dalam bentuk penelitian ini adalah ini adalah sebagai

berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti langsung mengadakan pengamatan untuk objek yang ingin diteliti pada lokasi penelitian. Hasil dari kegiatan observasi ini akan di save melalui tulisan yang diurai dalam bentuk kalimat terstruktur yang kemudian akan di kembangkan dalam sebuah wacana sistematis. Dalam maksud lain bahwa panduan observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis tentang kejadian sosial dengan gejala-gejala praktik yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal penelitian ini berarti observasi dilakukan oleh peneliti semata mata dilakukan untuk mengbservasi implementasi program pendidikan gratis

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan sala satu teknik yang digunakan dalam instrument penelitian, instrument ini sangat banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Infrman adalah objek langsung dari penelitian untuk mendapatkan infrmasi. Hal ini dilakukan dengan wawancara antara informan dengan peneliti. Akurasi data dengan sistematis adalah tujuan dari penganmbilan infrmasi dari informan secara live. Dalam bentuk wawancara untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara akan dilakukan antar rang yang mewawancarai dengan orang yang di wawancarai. Interviewer akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang ingin ditemukan jawabannya berdasarkan konsep yang ingin diteliti, kemudian interviewee juga akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara antar peneliti dengan infrman akan memberi penguatan atas data awal yang di dapatkan melalui bservasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan agar mendapat informasi yang berasal dari arsip dan dokumen yang ada. Kemudian akan dilakukan konsep analitis terhadap document document yang dianggap penting dan nyambung terhadap apa yang ingin diteliti. Selain itu dokomet atau arsip juga dianggap sebagai bukti dari infrmasi yang disampaikan oleh informan agar tidak bermuara pada anggapan pemberian informasi palsu maka antara arsip dan hasil wawancara akan di adakan perbandingan. Selain itu arsip dkument juga adalah bukti dari inplementasi program seelum hari ini. Dokumentasi yang lain yang dianggap juga sebagai faktr pendukung dari hasil penelitian adalah data data Guru, peserta didik dan data sekolah seperti fasilitas kantor perpustakaan dan ruang guru dan prasarana lainnya

yang ada di SMPN 4 Malunda di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Document juga akan member penguatan pembenaran dari semua data yang diambil sehingga validasi data benar benar akurat dan factual.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu berupa metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya peneliti akan melakukan perlakuan terhadap informasi yang telah dirangkum untuk kemudian diproses dan dianalisis.

a. Pengumpulan Data

Pada awal penelitian karna penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka terlebih awal akan dilakukan studi preliminary, hal ini dimaksudkan demi untuk pemeriksaan atau pembuktian bahwa latar belakan permasalahan telah ada pada objek yang sedang ingin diteliti. Namun studi ini sudah bagian dari pengumpulan data sebagaimana observasi. Peneliti telah mengadakan wawancara, dan lain sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut ialah data. Pada saat peneliti mulai terjun kelokasi penelitian melakukan pendekatan terhadap objek penelitian (sumber data) kemudian melakukan hubungan dengan subjek penelitian, dengan responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan, bahkan ketika peneliti berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, semua itu suda termasuk proses pengumpulan data yang hasilnya ialah data yang siap akan di olah menjadi hasil dari penelitian.

b. Reduksi Data.

Selanjutnya penulis atau peneliti akan melakukan reduksi terhadap data yang diperoleh, Mereduksi data yaitu suatu cara dalam mengumpulkan dan memilih sesuatu yang pokok, kemudian fokus pada sesuatu penting dan jelas. Hal tersebut, dimaksudkan untuk dilakukan dilakukan demi memper mudah peneliti untuk mengolah data, sebab data pasti sangat banyak.

c. Data Display (penyajian data)

Melakukan penyajian data dilakukan dengan uraian singkat dari hasil analisis data, peneliti akan melakukan pemilihan untuk dihubungkan berdasarkan dengan kategori. Dalam penyajian data ini peneliti dan pembaca akan memudahkan untuknya memahami hasil dari penelitian ini, termasuk kejadian kejadian yang di kumpulkan untuk penelitian ini.

Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian akan dilakukan penyimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti yang sifatnya klaim. Hai itu akan sendirinya menemui kagalannya jika tidak bisa dilakukan dengan pembuktian-

pembuktian. Namun apabila peneliti dapat memberikan bukti bukti konkrit maka kesimpulan yang akan di sampaikan lewat uraian uraian maka dapat dikatakan factual. Sehingga Kesimpulan yang kemudian yang akan disampaikan oleh seorang peneliti dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dituliskan pada latar belakan masalah dapat dikatakan berhasil. Namun keberhasilan itu kan tercapai setelah selesai pengumpulan data pada objek penelitian, sebab terkadang setelah berada pada lapangan dimana peneliti akan memulai penelitiannya terkadang lari dari permasalahan yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMPN4 Malunda

Program pendidikan gratis merupakan konsep yang sering didengar, diucapkan tetapi tidak dipahami sepenuhnya. Program pendidikan gratis biasa dimaknai sebagai upaya dalam membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di SMP. Upaya tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mendapatkan pendidikan sebagai hak bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana dalam UUD 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi dasar dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Upaya dalam menggali informasi tentang Program Pendidikan Gratis, peneliti menanyakan kepada beberapa informan.

Wawancara kepada bapak Amiruddin, S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Malunda mengatakan:

“Kebijakan pemerintah tentang Program Pendidikan Gratis ini sangat membantu proses pembelajaran karena dengan adanya kebijakan tersebut dana program yang ada didukung oleh anggaran-anggaran pendidikan yang sudah ada sebelumnya yang diberikan oleh pemerintah salah satunya program Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa, dengan adanya bantuan tersebut tentu sangat membantu program pendidikan gratis disekolah.”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat antusias dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan di Sulawesi Barat. Tambahan dari bapak Sudomo selaku Bendahara SMP Negeri 4 Malunda mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Program Pendidikan gratis tentu sangat membantu beberapa program disekolah yang dikelola berdasarkan beberapa item, diantaranya pembiayaan fasilitas sekolah pemberian beasiswa miskin dan siswa yang berprestasi.”

dilanjutkan wawancara dengan ibu Asmarita selaku orang tua siswa SMP Negeri 4 Malunda mengatakan bahwa:

“Program pendidikan gratis cukup membantu bagi kami masyarakat yang ekonominya sangat rendah karena tidak ada pungutan dari sekolah misalnya pembayaran SPP ataupun sumbangan untuk pembangunan sekolah, namun masih perlu ditingkatkan anggarannya agar seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan benar-benar digratiskan.”

Hal ini berarti harapan orang tua khususnya di SMP Negeri 4 Malunda agar menggratiskan seluruh yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun hasil wawancara dengan salah satu siswa SMP Negeri 4 Malunda atas nama Hairil mengatakan bahwa:

“Selama saya sekolah disini saya belum pernah mendapat iuran baik SPP, ataupun pembangunan sekolah kecuali iuran untuk pengambilan baju batik dan baju olahraga. Meskipun pembelian baju batik dan baju olahraga hanya ada satu kali dalam tiga tahun namun kami harap agar semua yang berkaitan dengan pendidikan dapat digratiskan.”

Hasil wawancara diatas dikatakan bahwa, program pendidikan gratis membantu pelaksanaan proses pendidikan di SMP Negeri 4 Malunda karena tanpa adanya pembiayaan SPP ataupun iuran pembangunan kampus, melainkan memberikan beasiswa bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Meskipun ada pembayaran untuk pengambilan baju batik dan baju olahraga namun masyarakat sadar bahwa yang namanya program pendidikan gratis tidak keseluruhan digratiskan. Kebijakan pemerintah tentang program pendidikan gratis tersebut sangat meringankan beban orang tua siswa dalam mengatasi biaya pendidikan anak-anak mereka.

Pembahasan

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda

a. Faktor Pendukung

Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Bupati Majene Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Sekolah.

Selain dari regulasi yang menjadi pendukung terlaksananya program pendidikan gratis, juga dibutuhkan dukungan dari beberapa unsur yang terlibat dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis. Hal ini diakui oleh bapak H. Imran selaku sekretaris SMP Negeri 4 Malunda menyatakan bahwa:

“Faktor dukungan dari semua komponen SMPN 4 Malunda diantaranya Kepala sekolah/wakil, komite, bendahara, tenaga pendidik, siswa, masyarakat sekitar, jadi penentu terselenggaranya program pendidikan gratis di SMPN 4 Malunda.”

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Nurmasita selaku Kepala Perpustakaan mengatakan bahwa:

“Faktor komitmen dari seluruh unsur yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergitas seluruh unsur yang membidangi pelaksanaan pendidikan gratis sangat dibutuhkan.”

Keseriusan berbagai komponen tersebut untuk mengoptimalkan terselenggaranya Program Pendidikan Gratis dengan baik akan melahirkan suatu implementasi pendidikan yang baik.

b. Faktor Penghambat

Semua unsur yang terkait dengan pendidikan mulai dari pemerintah/tim pengendali pendidikan gratis kabupaten, dan beberapa unsur disekolah juga menjadi penghambat apabila tidak bersinergi dengan baik dalam pengelolaan pendidikan gratis dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Amiruddin Kerpalasa Sekolah SMP Negeri 4 Malunda mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis salah satunya adalah penyaluran anggaran yang tidak tepat waktu ke sekolah sehingga sangat berefek ketidak tepatan dalam perencanaan program pendidikan gratis di sekolah.”

Begitu pula hasil wawancara dengan ibu Rahmatia guru SMP Negeri 4 Malunda menyatakan bahwa:

“Kendala utama implementasi Program Pendidikan Gratis yaitu tidak optimalnya dalam pengawasan tim pengendali pendidikan gratis tingkat kabupaten dan unsur-unsur yang menjadi ujung tombak dalam kebijakan tersebut.”

c. Solusi Implementasi Program Pendidikan Gratis

Adapun solusi diantaranya adalah penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, peningkatan sosialisasi dari pemerintah, mengoptimalkan pengelolaan dana dan laporan pertanggungjawaban dikumpul tepat waktu. Informan bapak Jumadi selaku komite sekolah mengatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi solusi dalam program pendidikan gratis adalah dengan mengoptimalkan penyaluran anggaran sehingga seluruh program sekolah yang masuk dalam item anggaran dapat terlaksana dengan baik.”

Begitupun dengan hasil wawancara dengan ibu Nurmasita selaku kepala perpustakaan yaitu:

“laporan pertanggungjawaban harus diselesaikan dan disetor tepat waktu agar penyaluran anggaran periode berikutnya berjalan dengan baik dan tepat waktu.”

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data hasil penelitian tentang Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program pendidikan gratis di SMP Negeri 4 Malunda
Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene telah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan diantaranya adalah pembayaran untuk pengambilan baju batik dan baju olahraga karena itu masuk dalam Biaya Operasional Sekolah. Diluar daripada itu tidak ada lagi pembayaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran, melainkan memberikan biaya bagi siswa dalam bentuk beasiswa miskin.
2. Faktor Pendukung Dan penghambat
 - a. Faktor Pendukung
Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Bupati Majene Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Sekolah. Faktor dukungan dari semua komponen SMPN 4 Malunda diantaranya Kepala sekolah/wakil, komite, bendahara, tenaga pendidik, siswa, masyarakat sekitar, jadi penentu terselenggaranya program pendidikan gratis di SMPN 4 Malunda. Dan komitmen dari seluruh unsur yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan gratis.
 - b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat implementasi Program Pendidikan Gratis salahsatunya adalah penyaluran anggaran yang tidak tepat waktu ke sekolah sehingga sangat berefek ketidak tepatan beberapa program yang dilaksanakan di sekolah. Kendala utama implementasi Program Pendidikan Gratis yaitu tidak optimalnya dalam pengawasan tim

pengendali pendidikan sehingga dana yang masuk kesekolah mengalami keterlambatan.

c. **Solusi Implementasi Program Pendidikan Gratis**

Adapun solusi diantaranya adalah dengan mengoptimalkan dalam penyaluran anggaran, laporan pertanggungjawaban diselesaikan dan disetor tepat waktu, dan mengoptimalkan sosialisasi dari pemerintah agar semua yang berkaitan dengan pendidikan gratis dapat terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Busyairi, A., & Hamjah, B. 2020. Peran Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Menangani Kemiskinan Di Era Milenial (Studi Kasus Loka Latihan Kerja Ukm Kabupaten Biak Numfor) *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8 (2477–0515), 114–123.

Hasbullah, M, H. 2015. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia. In Edisi Ke 1.

Jumadi. (2014). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.

Mujianto Solichin. 2015. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Studi Islam*

Mukhlis Hannan. 2017. PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP TUPOKSI CAMAT DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU. *MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*

Yanti, S. 2020. Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah